



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

REVIU KE-III MATRIKS RENSTRA 2020-2024

JL. LETJEND SUPRAPTO, CEMPAKA PUTIH, JAKARTA PUSAT

TLP & FAX : 021-4254257
WEBSITE : WWW.PT-JAKARTA.GO.ID
E-MAIL : INFO.PTDKJAKARTA@MAIL.COM
IG : @PENGADILANTINGGI_DKI_JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Matriks Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Matriks Renstra 2020-2024 menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Matriks Renstra 2020-2024 telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Matriks Renstra 2020-2024 ini.



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab


Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005

REVIU SHEET KE- III
MATRIKS RENSTRA 2020- 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Matriks Renstra 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator pada Matriks Renstra	Lampiran
2	Perubahan Target pada Matriks Renstra	Lampiran



Jakarta, 01 September 2022

Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

Nip. 19560405 198203 1 005

REVIU KE-III MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

INSTANSI : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		TARGET (20 Th)	SASARAN		TARGET					STRATEGI					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran	
																7
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	95%	95%	98%	98%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	51%	33%	33%	33%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-

					d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	95%	3	3	3	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-
2.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor (Reviu 2022)	73% 100%	99% 94%	95% 95%	98% 98%	98% 98%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	5 Kegiatan 20.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-
					b	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-



Jakarta, 01 September 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/150/KP.01.1/9/2022**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU (IKU), RENSTRA, PKT, DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

- Menimbang** : 1. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
2. bahwa berdasarkan hasil Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan IKU, RENSTRA, PKT dan RKT Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan / Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Penetapan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2022

Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.H.
NIP. 19560405 198203 1 005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/139 /KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

[Handwritten Signature]
DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,


 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
 NIP. 195604051982031005

**REVIU KE-II MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA SEBELUM REVIU 01 SEPTEMBER 2022**

INSTANSI : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		TARGET (20 Th)	SASARAN		TARGET					STARTEGI								
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran				
																1	2	3	4
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	95%	99%	99%	99%			Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-	
					c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	51%	58%	58%	58%			Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-	

					d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	95%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-
2.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana	73% 100%	99% 94%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan 	5 Kegiatan 20.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-
					b	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-



Jakarta, 31 Desember 2021

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005

